

STRATEGI PARTISIPATIF PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DESA (*RENSTRADES*) SEBAGAI *PLANWORK* PELESTARIAN LINGKUNGAN PENDUKUNG CAGAR WISATA DI DESA KEBONSARI KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG

Arif Hidayat

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
E-mail: arifardat@gmail.com

Abstrak. Artikel hasil pengabdian ini ‘concern’ untuk mendeskripsikan penguatan partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengelolaan lingkungan pendukung cagar wisata. Desa Kebonsari, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dipilih sebagai lokus pengabdian, mengingat keberadaannya sebagai kawasan penyangga wisata dalam zonasi terluar rencana jangka panjang pengelolaan taman wisata Borobudur. Desa ini adalah penyokong produk kerajinan khas Borobudur, baik berupa relief maupun souvenir dari bahan bambu. Pelatihan ini menggunakan teknik diseminasi, pendampingan dan simulasi bagi masyarakat untuk menyusun Renstrades secara partisipatif sebagai ‘planwork’ pelestarian lingkungan pendukung cagar wisata Candi Borobudur. Strategi yang digunakan adalah: (i) berbagi pengalaman dalam proses pendokumentasian rencana strategis desa; (ii) diseminasi informasi pengelolaan kolaboratif taman wisata candi borobudur; dan (iii) menjaring komitmen semua pihak untuk bekerjasama dalam pengelolaan taman wisata secara berkelanjutan. Target pelatihan ini adalah peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan desa secara terpadu sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Perencanaan strategis desa ini diperlukan untuk mengintegrasikan rencana pengelolaan taman wisata dan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Magelang, dengan harapan dapat: (i) melindungi, memperluas dan menjamin ruang otonomi dan kebebasan masyarakat desa; (ii) melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa; (iii) menjamin partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; dan (iv) memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik-ekonomi masyarakat desa.

Kata Kunci: Rencana Strategis, Lingkungan Desa, Cagar Wisata, Borobudur.

PENDAHULUAN

Kecamatan Borobudur, terdiri dari 20 Desa dengan penduduk berjumlah 22.000 jiwa termasuk wilayah Kabupaten Magelang yang ditetapkan sebagai taman wisata, jika ditinjau dari sisi fungsi taman wisata berdasarkan surat keputusan Dirjen PHPA No. 129 kpts/DJ-VI/1996 antara lain fungsi sebagai kawasan perlindungan sistim penyangga kehidupan, kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan sebagai kawasan pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari. Balai taman wisata Borobudur telah mengawali dengan proses revisi zonasi dan rencana pengelolaan taman wisata jangka panjang yang menjadi rencana dasar pengembangan taman wisata dan bisa menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam membuat perencanaan sehingga tidak ada tumpang tindih kebijakan.

Kebonsari merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Posisinya berada dalam zonasi terluar rencana pengelolaan taman wisata jangka panjang. Borobudur telah dikenal oleh banyak orang sebagai kawasan wisata konservasi Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia, namun ketidaktertiban dan buruknya penataan pariwisata memberikan kesan buruk di mata dunia. Hal tersebut akibat rendahnya partisipasi masyarakat desa di sekitar candi Borobudur, karena tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Desa Kebonsari adalah salah satu desa penyokong penting produk kerajinan khas Borobudur (Gema Suara Bhudara, Edisi 1 Maret 2009).

Sebagaimana penelitian tim pengabdian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Desa Kebonsari yang dihuni oleh \pm 1012 KK di 6 Dusun (Gupit, Kebonwage, Pule, Cakran, Dalangan, Gunungmujil) dan mayoritas beragama Islam, tergolong rendah kepedulian terhadap pendidikan. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan warga yang mayoritas

hanya lulusan SD dan SMP. Desa ini adalah desa penyangga atau sabuk hijau bagi Kecamatan Borobudur, dikelilingi jajaran gunung dan perbukitan menora. Setiap perbatasan Desa Kebonsari sebelum sampai pada desa lain kecuali perbatasan sebelah utara terdapat perbukitan yang masih alami, diantaranya, Gunung Sigandul, Ngroto, Watu Singkal, Thukbaris, Krakalan dst. Kebonsari sebagai daerah yang subur, kehidupannya sangat kental dengan bidang pertanian, di tengah desa dilalui irigasi yang dibuat pada zaman Belanda. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani tradisional. Meskipun demikian, potensi industri kecil juga berkembang cukup pesat, khususnya kerajinan khas borobudur seperti relief dan *souvenir* berbahan dasar bambu, kayu dan batu lainnya. Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi masyarakat Kebonsari yang mayoritas berada di bawah garis kemiskinan. Potensi wisata alam yang seharusnya dapat dikelola untuk mensejahterakan warga serta dukungan potensi Wisata Candi Borobudur yang mendunia tidak terlalu membantu kesejahteraan warga.

Untuk itu, idealnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sangatlah penting, mengingat masyarakat secara langsung ataupun tidak merupakan aktor utama dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Selama ini yang terjadi adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan taman wisata oleh karena itu untuk mencapai efektifitas pengelolaan dibutuhkan peran masyarakat secara langsung melalui keterpaduan rencana pengelolaan taman wisata, rencana tata ruang wilayah (RT/RW) kabupaten dan rencana strategis desa.

Desa beserta komponen di dalamnya dari masa ke masa akan berubah akibat pengaruh dari kekuatan internal dan eksternal. Pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan *stakeholders* lain akan selalu berusaha untuk mencari kesesuaian antara kedua kekuatan

itu menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi keberlangsungan warga masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui suatu proses pengamatan dan penelaahan yang berhati-hati mencakup; sumber daya, aturan, siklus manajemen, personil, harapan, tujuan, masyarakat dan komitmen. Di samping itu, dilakukan identifikasi dan pengujian terhadap faktor-faktor lain yang menjadi peluang atau penghambat.

Penyusunan Renstrades sangat dibutuhkan di era otonomi daerah, untuk dijadikan sebagai kerangka acuan pembangunan desa-desa di Kecamatan Borobudur dalam jangka panjang dengan tetap mengacu pada sebuah dokumen yang dibangun secara bersama dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan di tingkat desa. Selain itu pendokumentasian rencana strategis desa merupakan salah satu cara untuk meningkatkan peran nyata masyarakat dalam pengelolaan pariwisata Candi Borobudur.

Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan taman wisata sangatlah penting, mengingat masyarakat secara langsung ataupun tidak merupakan aktor utama dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Selama ini yang terjadi adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan taman wisata oleh karena itu untuk mencapai efektifitas pengelolaan dibutuhkan peran masyarakat secara langsung melalui keterpaduan rencana pengelolaan taman wisata, rencana tata ruang wilayah pemerintah daerah Kabupaten Magelang dan rencana strategis Desa.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Secara skematis komponen-komponen interaktif lingkungan hidup dapat digambarkan ke dalam tiga aspek, yaitu: (a) aspek alam (*natural aspect*); (b) aspek sosial (*social aspect*); dan (c) aspek binaan (*man-made/build aspect*) (Sarwono, 1995: 32).

Purba (2002: 28) merumuskan tentang

konsep pengelolaan lingkungan sosial sebagai suatu upaya atau serangkaian tindakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atau pengawasan, dan evaluasi yang bersifat komunikatif.

Pelatihan penyusunan Renstrades untuk mendukung pengelolaan taman wisata Borobudur ini akan diawali di Desa Kebonsari, dengan harapan dokumen tersebut dapat dijadikan referensi bagi seluruh desa di Borobudur, serta menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan pengembangan desa.

Penyusunan Renstrades yang partisipatif hanya akan terjadi apabila didukung dengan tata kelola Pemerintahan Desa yang demokratis. Indra J. Piliang (2003: 57-59) menyebutkan bahwa pemerintahan yang baik adalah sekumpulan prinsip dan gagasan mengenai: (a) Keabsahan (*legitimasi*), kewenangan (*kompetensi*) dan pertanggung-jawaban (*accountability*) dari pemerintah, (b) Penghormatan terhadap kewibawaan (*supremasi*) hukum dan perangkatnya dan hak asasi manusia, serta (c) Berbagai hal lainnya yang diharapkan oleh rakyat dari pemerintah yang melayani kepentingan khalayak.

Pemerintah yang baik adalah sebuah kerangka mendasar di mana kegiatan wira usaha (pedagang, petani, buruh, dll.) dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan secara adil. Pemerintah yang baik menjamin hak masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan publik yang lainnya. Tanpa suatu pemerintahan yang baik, sangatlah sulit untuk mewujudkan pelayanan publik dengan kualitas yang baik. Menurut Bagir Manan (2001: 34), "ciri-ciri dan kewajiban pemerintah yang baik bersifat menolong, bergantung pada tata aturan, bersifat terbuka (*transparan*), bertanggungjawab (*accountable*), menghargai dana publik (atau uang rakyat), bersifat responsif, menawarkan informasi, bersifat adil".

Gagasan partisipasi politik pada

dasarnya adalah ide untuk memungkinkan keterlibatan masyarakat desa dalam proses politik di tingkat desa, terutama dalam proses pengambilan kebijakan publik di desa. H.A.W. Widjaja (2003: 67), menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik di tingkat desa merupakan upaya untuk melakukan pembatasan kekuasaan dan melakukan kontrol sosial terhadap praktek penyelenggara pemerintahan desa. Dengan adanya partisipasi dalam kegiatan politik, maka pemerintahan desa harus mempertimbangkan kepentingan rakyat desa sebagai dasar pengambilan keputusan publik.

Bryson, J.M. (2002: 112) menyebutkan bahwa tugas pemerintahan yang setingkat distrik (desa), meliputi: (a) menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; (b) melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; (c) menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan (d) menumbuh-kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Renstrades memiliki urgensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, makna penting Renstrades menurut Slamet Luwihono (2005: 17-18) adalah: (a) Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan dukungan seperangkat Renstra yang bisa mengarahkan penyelenggara pemerintahan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. (b) Untuk mengubah perilaku penyelenggara pemerintah desa ke arah perilaku yang berpihak kepada rakyat di suatu desa, maka penyusunan instrumen hukum berupa Renstra haruslah dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan semua unsur yang ada dalam masyarakat dan dilakukan secara terbuka. (c) Dengan penyusunan Renstra yang partisipatif ini, peluang pemerintahan desa untuk menggunakan Renstra sebagai alat politik dalam rangka memper-

juangkan kepentingan pribadinya dapat diminimalisir. (d) Partisipasi dapat digunakan sebagai instrumen pembatasan kekuasaan pemerintahan desa dan sebagai mekanisme kontrol sosial bagi pemerintahan desa dalam penyusunan Renstra yang berdampak pada masyarakat.

R.M.Z. Lawang (2003: 84), menyatakan bahwa tantangan pelaksanaan partisipasi dalam penyusunan Renstrades, antara lain: (a) Sistem yang terbangun dalam penyusunan Renstrades belum memberikan ruang yang luas, aman, dan memadai bagi pengembangan partisipasi masyarakat. (b) Belum terbangun kemauan politik dari pemerintahan di desa (sebagai prasyarat partisipasi) untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan Renstrades. (c) Sudah berkembangnya kultur tanpa partisipasi, sehingga partisipasi sering dimaknai sebagai ekspresi resistensi. (d) Masih rendahnya kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi. (e) Minimnya kemampuan dalam keuangan, karena dalam pelaksanaan partisipasi tidak bisa dilepaskan dari pendanaan.

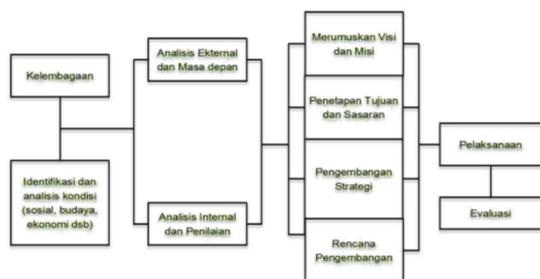
METODE

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode diseminasi, pendampingan dan simulasi penyusunan Renstrades desa. Diseminasi (*dissemination*) adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Artinya, diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Ini berbeda dengan difusi yang merupakan alur komunikasi spontan (Rod Ellis, 2009: 17). Pendampingan adalah membantu masyarakat baik individu maupun kelompok untuk menemukan kemampuan yang ada pada diri mereka. Sedangkan simulasi adalah suatu metode un-

tuk melaksanakan percobaan dengan menggunakan model dari satu sistem nyata (*state of affairs*) guna memformulasikan dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi di dunia nyata (*real world*) (Edi Suharto, 2005: 93).

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah aparat pemerintah Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur, Sasaran strategisnya adalah Kepala Desa dan perangkatnya, BPD, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat di lingkungan Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Dengan harapan agar para elite pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tersebut mampu mengimplementasikan setiap proses dan tahapan penyusunan Renstrades berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi dan demokrasi. Pelaksanaan pengabdian ini menggunakan media sederhana berupa kertas plano dan *white board* serta LCD untuk mempermudah penyampaian materi.

Kerangka pemecahan masalah pengabdian ini berbentuk kaji tindak dan analisis kritis-yuridis mengenai perencanaan strategis organisasi. Berikut adalah bagan tindak kaji penyusunan Renstrades desa.



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

Langkah tindak kaji tersebut dapat dijabarkan, sebagai berikut. (1) Observasi empiris eksistensi penyusunan Renstrades di Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. (2) Identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ditemukan dalam

observasi. (3) Melakukan diskusi, dan *sharing* dengan pihak kecamatan maupun desa, dilanjutkan dengan diskusi tim pengabdian guna menentukan materi dan mempersiapkan perangkat yang dibutuhkan. (4) Memberikan diseminasi, pendampingan dan fasilitasi penyusunan Renstrades desa. (5) Melakukan evaluasi kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan lanjutan hasil pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan diseminasi melalui penyuluhan dan dialog interaktif dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 September 2012, di ruang Pertemuan Desa Kebonsari. Sedangkan simulasi dan pendampingan penyusunan Renstrades dilakukan pada hari Minggu, 30 September 2012. Berikut adalah foto lokasi kegiatan dan pelaksanaan diseminasi.



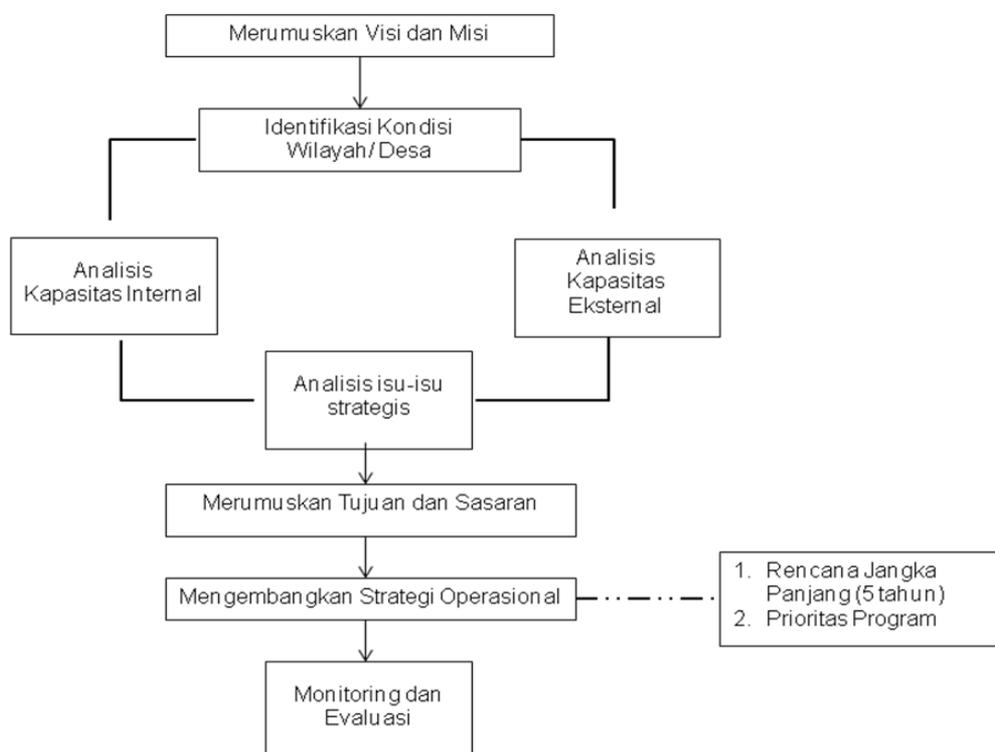
Gambar 2. Foto Lokasi Kegiatan & Dokumen Diseminasi Penyusunan Renstrades Desa

Kegiatan diseminasi, berjalan cukup efektif. Peserta kegiatan 18 orang, terdiri dari 12 orang perangkat desa, 2 orang tokoh masyarakat, 2 orang tokoh agama dan 2 orang tokoh pemuda. Selama pelatihan berlangsung banyak peserta yang ingin menyampaikan gagasan maupun pertanyaan, akan tetapi mengingat waktu yang terbatas, pertanyaan dan gagasan tersebut baru dapat disampaikan pada sesi dialog interaktif (tanya-jawab). Dari sekian gagasan dan tanya jawab yang terrekam menunjukkan bahwa secara umum hasil kegiatan diseminasi menunjukkan hasil positif.

Desa sebagai suatu sistem masyarakat dapat mengembangkan strategi untuk membangun komitmen dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki serta berupaya mengatasi ancaman eksternal melalui peluang yang ada. Proses analisis, perumusan, penetapan komitmen dan evaluasi langkah-langkah yang diambil disebut perencanaan strategis terpadu. Tujuan utama perencanaan strategis terpadu adalah agar organisasi dapat melihat

secara objektif kondisi internal dan eksternal, sehingga dapat mengantisipasi perubahan yang sedang dan akan terjadi. Materi pokok yang disampaikan berkaitan dengan model perencanaan strategis desa, dapat dilihat di Gambar 3.

Hasil pembelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan diseminasi adalah bahwa: (i) komitmen dari aparat desa dalam proses dokumentasi Renstrades merupakan modal utama penyusunan Renstra desa Kebonsari; (ii) aparat desa merupakan poros terpenting dalam pembuatan Renstra; (iii) pembangunan desa harus mempunyai tujuan; (iv) Renstrades harus disusun secara kolektif oleh seluruh komponen di masyarakat, karena merupakan landasan, acuan dan pedoman bagi desa untuk merealisasikan pembangunan sesuai dengan kultur dan kearifan masyarakat setempat. Selain itu, kegiatan ini meskipun secara sederhana telah berhasil mendokumentasikan persoalan umum di Desa Kebonsari, sebagaimana terlihat dalam tabel 1.



Gambar 3. Model Perencanaan Strategis Desa

Tabel 1 . Pemetaan Isu Strategis di Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang

| No | Masalah | Sebab | Akibat | Usulan Solusi |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pendidikan | Biaya pendidikan tinggi Rendahnya kesadaran akan arti penting pendidikan Tidak ada institusi/program pendidikan non-formal & informal Jumlah tenaga guru kurang (termasuk guru ngaji) | Banyak warga tidak mampu dan tidak mau menyekolahkan warganya Ketingkat yang lebih tinggi Lingkungan rusak Warga tidak tertarik mengikuti pendidikan non-formal maupun informal | Pembinaan & Pendidikan gratis (beasiswa) melalui koordinasi dengan pihak terkait Menyediakan informasi dan fasilitasi program pendidikan non-formal & informal Mengusulkan penambahan tenaga pendidikan Mengupayakan insentif/bantuan kepada para ustadz |
| 2 | Kesehatan & Lingkungan | Saluran tidak lancar Lingkungan kumuh Kurangnya tong sampah & MCK Kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah Belum tersedianya TPA Tidak adanya penyemprotan nyamuk dari dinas terkait | Penyakit, berkembangnya bibit-bibit nyamuk Berkembang biaknya lalat Numpuknya sampah dimana-mana | Penataan kembali saluran air Tersedianya tempat buang sampah dan TPA Penyemprotan secara rutin Tersedianya tenaga dokter |
| 3 | Kebutuhan Dasar | Kurangnya debit air Kurangnya air minum Kurang tertibnya penataan saluran air bersih (selang) Pembagian air tidak merata Kurangnya transportasi (adanya hanya ojek). | Kekurangan air bersih, terutama di musim kemarau Konflik masyarakat | Mengusahakan debit air selain irigasi Menyatukan saluran air yang liar Menata ulang kembali jaringan pipa air Pembagian yang adil di setiap lingkungan masyarakat. Sarana transportasi yang terjangkau masyarakat bawah |
| 4 | Pelayanan Publik | Balai desa tidak selalu buka Kurang melibatkan masyarakat dalam program-program pembangunan | Layanan administrasi lamban Masyarakat cuek terhadap program pemerintah | Memperbaiki layanan administrasi Melibatkan masyarakat dalam setiap program pembangunan |

Sumber: Hasil Diskusi Kelompok Peserta Pelatihan di Kebonsari, Sabtu (29/09/2012)

Rencana tindak lanjut yang kemudian terlaksana adalah menentukan pihak yang akan dilibatkan sebagai peserta simulasi dan pendampingan penyusunan Renstrades pada hari berikutnya. Kegiatan simulasi dan pendampingan penyusunan Renstrades (Minggu, 30 September 2012) merupakan upaya teknis penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa dalam penyusunan Renstrades. Kegiatan ini cukup berhasil, mengingat partisipasi aktif, keseriusan dan antusiasme 26 orang peserta, yang terdiri dari aparat Kecamatan Borobudur (1 orang), sekretaris desa (1 orang), aparat desa (4 orang), kepala dusun (6 orang), BPD (8 orang), perwakilan

LPP, PKK, PHC, LPMD dan tokoh agama (6 orang). Foto kegiatan pendampingan dan simulasi dapat dilihat pada Gambar 4.

Peserta dibagi menjadi 2 kelompok (Kelompok 1: Dusun Gupit, Gunung Mujil, Dalangan; dan Kelompok 2: Dusun Cakran, Kebonwage, Pule) untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan tiap dusun dan kemudian diplenokan sehingga menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh tim penyusun Renstrades. Secara umum hasil kegiatan pendampingan menunjukkan hasil positif, meskipun keterbatasan waktu menjadi kendala, sehingga masyarakat Desa Kebonsari berharap untuk diadakan pelatihan

lanjutan. Berikut adalah tabel hasil kegiatan, terkait dengan pemetaan isu strategis di Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.



Secara umum hasil pendampingan ini menyimpulkan pokok-pokok isu strategis yang bisa dijadikan bahan dasar penyusunan Renstrades, sebagaimana tabel 2.



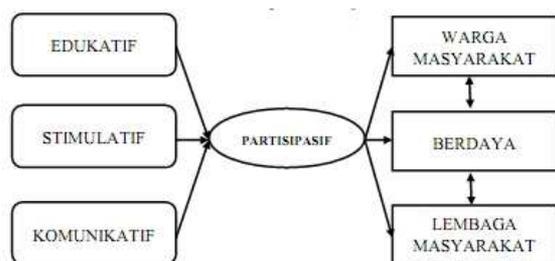
Gambar 4. Foto Lokasi Kegiatan & Proses Pendampingan/Simulasi Penyusunan Renstrades Desa

Tabel 2. Pengembangan Isu Strategis di Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang

| No | Isu | Permasalahan | Dampak | Rekomendasi |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | SDM di tingkat desa | Rendahnya kapasitas dan profesionalitas aparatur desa Tidak adanya tenaga teknis pendamping usaha kecil atau penyuluh pertanian maupun bina wisata | Desa kurang gairah Hasil tani (ekonomi) turun dan bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan | Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur desa Mengupayakan adanya tenaga teknis pendamping usaha kecil atau penyuluh pertanian maupun bina wisata |
| 2 | SDA di wilayah desa | Tidak adanya penyuluhan lingkungan cagar wisata, banyak pohon ditebang untuk dijual tanpa ditanami kembali Tidak adanya inisiatif aparatur desa mengembangkan potensi ekowisata Kesulitan air bersih agar sampai ke pemukiman warga Kurangunya MCK | Tidak tumbuhnya kesadaran lingkungan Potensi ekowisata terbengkalai Masyarakat belum bisa merasakan dampak pariwisata Kesehatan masyarakat menurun | Mengadakan penyuluhan lingkungan hidup (program penghijauan) dan kesehatan Berinovasi mempromosikan ekowisata dengan berkoordinasi dengan dinas terkait Menyediakan sarana & prasarana air bersih dan MCK dengan berkoordinasi dengan dinas terkait |
| 3 | <i>Good Village Governance</i> | Tidak adanya pertemuan antar masyarakat dengan Kelalain dan kehilafan pemimpin | Masyarakat dianggap tidak patuh terhadap peraturan di tingkat desa Tanggung jawabnya berantakan | Masyarakat dapat berdialog dengan aparat desa Secepat mungkin duduk bersama untuk masyarakat |
| 4 | Kesejahteraan sebagai tujuan demokrasi | Kurangnya lapangan kerja bagi usia produktif Tidak ada kontraprestasi dari pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur (PT TWCB) untuk kesejahteraan masyarakat Belum adanya penataan sarana prasarana penunjang UMKM Belum adanya kegiatan lain penunjang perekonomian masyarakat | Masyarakat belum bisa merasakan dampak pariwisata, padahal desa Kebonsari masuk pada zonasi pengembangan Masyarakat tidak tersentuh program pemerintah di bidang pemberdayaan UMKM Banyak pengangguran | Penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan usia produktif Mengupayakan kerjasama dengan PT TWCB Pembangunan sarana penunjang UMKM Membuka lapangan kerja bagi masyarakat berbasis ekologi melalui BUMDes ekowisata |

Sumber: Hasil Diskusi Kelompok Peserta Pelatihan di Kebonsari, Minggu (30/09/2012)

Kegiatan ini juga merekomendasikan untuk segera dibentuk Tim penyusun Renstrades yang melibatkan berbagai pihak untuk bekerja membuat profil desa sebagai tahap pertama penyusunan Renstrades di Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur. Berikut adalah pola pembangunan yang direkomendasikan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dikemukakan para peserta pelatihan.



Sumber: Hasil Diskusi Kelompok Peserta Pelatihan di Kebonsari, Minggu (30/09/2012)

Gambar 4. Pola Pembangunan Partisipatif

Kegiatan penguatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan Renstrades sebagai *planwork* pelestarian lingkungan pendukung cagar wisata di Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur, mendapatkan tanggapan positif dari berbagai pihak yang menjadi khalayak sasaran. Kontribusi pihak kecamatan Borobudur juga sangat besar sehingga simulasi serta pendampingan menjadi tepat sasaran dan efektif. Demikian juga dukungan penuh dari pimpinan Unnes, LPM Unnes dan Dekan FH Unnes yang berkenan memberikan bantuan dana bagi pelaksanaan kegiatan pelatihan.

Para peserta, bahkan betul-betul menginginkan pemahaman mengenai materi pengabdian yang diberikan oleh tim pengabdian. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi selama kegiatan pengabdian ini berlangsung, namun bukanlah merupakan hambatan yang mendasar, mengingat materi dan perangkat untuk pelatihan sudah dipersiapkan dengan baik. Di antara kendala yang ada adalah keterbatasan biaya

dan media yang diperlukan dalam kegiatan ini serta tidak adanya keberlanjutan program pengabdian sehingga capaian hasilnya kurang maksimal.

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan secara konkrit bahwa prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengedepankan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu pembangunan senantiasa ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi, pengamatan dan tanggapan langsung dari peserta pelatihan, kegiatan pengabdian ini cukup berhasil mengingat adanya peningkatan pemahaman mengenai mengenai urgensi dan mekanisme penyusunan Renstrades bagi para peserta. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan mereka memetakan dan mengembangkan isu strategis desa serta kecakapan mereka menyusun pola pembangunan partisipatif yang selanjutnya akan dituangkan dalam Renstrades. Para peserta juga merekomendasikan agar pihak pemerintahan desa segera membentuk Tim penyusun Renstrades, yang agenda pertamanya membuat profil desa sebagai database penyusunan Renstrades. Hambatan yang dihadapi selama kegiatan pengabdian ini berlangsung bukanlah merupakan hambatan yang mendasar, seperti keterbatasan waktu dan keberlanjutan program pelatihan.

Saran

Berdasarkan tanggapan dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pengabdian, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. (a) Pemerintah Kecamatan Borobudur harus memfasilitasi terbentuknya

Renstrades di Desa Kebonsari dan tercapainya agenda penyusunan Profil Desa berbasis ekowisata sebagai *planwork* pelestarian lingkungan pendukung cagar wisata. (b) Pemerintahan Desa Kebonsari bersama masyarakat harus memiliki komitmen kolektif sebagai modal utama mewujudkan desa yang ramah lingkungan dan sejahtera, melalui peningkatan kapasitas dan profesionalitas kerjanya. (c) Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan, khususnya terkait dengan penyusunan Renstrades dan Profil Desa berbasis ekowisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryson, J.M, 2002. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Terjemahan: Miftahuddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ellis, Rod. 2009. *Task-based Language Learning and Teaching*. Oxford: Oxford University Press.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Piliang, Indra J. dkk (editor), 2003. *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa
- Purba, Jonny. 2002. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- R.M.Z Lawang (2003), *Kemandirian Desa, dalam Jurnal Forum Inovasi Capacity Building & Good Governance*. Jakarta: UI Press
- Sarwono, Sarlito, W. 1995. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Gramedia.
- Slamet Luwihono, "Renstra (RENSTRA): Instrumen Menggapai kesejahteraan Masyarakat di Era Transisi Otonomi Daerah", dalam Majalah Tetruka, Edisi Januari 2005
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Aditama.
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.